

**PERAN GERAKAN “SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI”
DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah



**Oleh:
Bilqis Asrori
NIM. F52917004**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : BILQIS ASRORI

NIM : F52917004

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2019

Saya yang menyatakan



BILQIS ASRORI

HALAMAN PERSETUJUAN
Tesis Bilqis Asrori ini telah disetujui
Pada tanggal 13 Juni 2019

Oleh
Pembimbing



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag
NIP. 19600412 199403 1 001

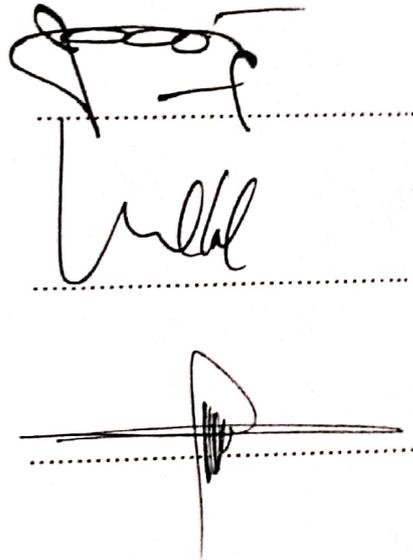
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Bilqis Asrori ini telah diuji

Pada Tanggal 1 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 19600412 199403 1 001
2. Prof. Dr. H. Shonhaji, Dip.Is
NIP. 19490728 196712 1 001
3. Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 19760121 200710 1 001



Surabaya, 9 Agustus 2019



Direktur
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 19600412 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bilqis Asrori
NIM : F52917004
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Dirasah Islamiyah
E-mail address : bilqis.ashol12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peran Gerakan " Saya Perempuan Anti Korupsi " Dalam Pendidikan Anti Korupsi di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2019

Penulis


(Bilqis Asrori)

korupsi yang menyeret sejumlah pejabat pemerintahan, salah satu kasus yang terjadi di Bangkalan. Kasus korupsi di Bangkalan yang menyeret nama Bupati dalam periode 2003-2013, Fuad Amin waktu itu dikenakan hukuman 13 tahun penjara, ketua DPRD Bangkalan 2004-2019 itu terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang kurun 2003-2014 mencapai RP 414 miliar.⁴

Alasan hidup KPK adalah mengakarnya praktik korupsi yang semakin berkembang luas. Beberapa dekade sebelum reformasi, korupsi telah membatin dalam berbagai lini, seperti dalam kerja sistem politik, ekonomi, dan sosial kita. Ada kesepakatan virtual di berbagai kalangan pemerhati bahwa korupsi menjadi penyakit yang menjalar cepat bak kanker ganas. Ia memberi kontribusi besar dalam beragam bentuk keterpurukan Indonesia.⁵

Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi, tapi masih saja ada pihak-pihak yang tetap melakukan tindakan korupsi, sehingga selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi. Tidak hanya KPK, tapi instansi-instansi yang lain juga harus turun tangan dan terlibat dalam upaya ini. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi, jika ini dibiarkan, maka ini akan menghancurkan negeri ini.

Kita ketahui bersama bahwa KPK merupakan lembaga Negara yang bersifat independen dan dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan manapun. Oleh karena itu, KPK tidak bisa bekerja sendirian untuk memberantas

⁴ Detik News, “*Korupsi RP 414 Miliar, Berapa Gaji Fuad Amin Eks Bupati Bangkalan?*”, dalam <https://news.detik.com/berita/3657623/korupsi-rp-414-miliar-berapa-gaji-fuad-amin-eks-bupati-bangkalan> (20 Januari 2019).

⁵ Tri Agung kristanto dan Irwan Suhanda, *Jangan Bunuh KPK: Perlawanan terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi.*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 119.

b. Nadri Taja dan Helmi Aziz,¹³ Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. XIII, No. 1, Juni 2016. Penelitian ini berfokus pada pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran agama islam di Sekolah Menengah Atas. Temuan dalam penelitian ini adalah suatu rancangan pembelajaran anti korupsi yang mengandung nilai-nilai anti korupsi, seperti kejujuran, kepedulian, kerja keras, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan, keberanian dan kemandirian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

c. Putri Hardianti,¹⁴ Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisa' Ayat 58. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusaalam Banda Aceh. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 memberikan perhatian kepada manusia untuk saling berbuat adil, tidak berlaku curang, bohong dan khianat. Menjalankan amanat dan berbuat adil ditujukan pada manusia tanpa membedakan agama, ras dan keturunan. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian kepustakaan.

¹³ Nadri Taja dan Helmi Aziz, "Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII. No. 1, (Juni 2016).

¹⁴ Putri Hardianti, "Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisa' Ayat 58", (*Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. 2017*).

mekanisme sosial yang mengintegrasikan peran-peran yang banyak itu sehingga tidak terjadi konflik.

Dalam teori peran, ada Mekanisme sosial artikulasi set peran oleh Robert King Merton:

1. Kepentingan relatif dari berbagai status. Pertama dari mekanisme ini berasal dari keadaan sosial yang dapat dilihat bahwa struktur sosial dapat memberikan implikasi terhadap status sosial dengan memiliki kepentingan tertentu.
2. Perbedaan kekuatan dari masing-masing peran. Dalam hal ini adanya kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing struktur sosial dengan mengamati kemampuan yang dapat diprediksi dalam tindakan sosial yang dilakukan.
3. Isolasi aktivitas peran dari pengamatan anggota set peran. seseorang tidak terlibat dalam suatu interaksi secara terus-menerus dalam suatu peran tertentu. Interaksi dengan masing-masing kelompok peran cenderung berbeda.
4. Permintaan konflik oleh anggota set peran. Adanya tuntutan yang diterima oleh anggota peran yang terkadang bertentangan dengan tuntutan yang lain, sehingga akan menjadi tugas dari anggota kelompok peran sebagai pemilik status.
5. Dukungan sosial yang sama diantara pemilik status. Mekanisme ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemilik status yang hampir sama

orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi lebih dikenal dengan sebuah perbuatan jahat dengan mengambil barang atau harta milik Negara secara tidak jujur dan di luar ketentuan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, istilah korupsi tidak jauh berbeda dengan istilah perampokan dan pencurian yang biasa dilakukan oleh para penjahat dan residivis. Korupsi, perampokan, dan pencurian sama-sama perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, tindakan yang amoral dan merugikan diri sendiri dan orang lain. bedanya, perbuatan korupsi dilakukan oleh anggota pemerintahan, yang berpendidikan, memiliki kekuasaan dan jabatan. Sedangkan perampokan dan pencurian dilakukan oleh para penjahat dan orang-orang non pemerintah yang tidak memiliki jabatan.¹³

Ada banyak pakar yang mengatakan tentang beberapa hal yang dapat mendukung maraknya tindakan korupsi diantaranya: lemahnya penegakan hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kurangnya kebebasan pers, gaji pegawai pemerintah yang kecil, masyarakat yang tidak peduli atau tidak tertarik atau mudah dibohongi, pembelian kekuasaan dalam pemilu (*money politic*), kurangnya pengawasan terhadap penyuapan atau penyogokan baik pengawasan internal maupun eksternal. Adapun faktor internal penyebab seseorang melakukan korupsi yaitu lemahnya iman sehingga ada keinginan, hasrat dan kehendak untuk

¹² Ikka Nur Wahyuni, Pengembangan Pendidikan Financial Literacy Berbasis Nilai-nilai Anti Korupsi sebagai Investasi Sosial: Sebuah Pemikiran, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 07 November 2015, 4.

¹³ Nurul Yaqin, Program Anti Korupsi di Madrasah, *Islamuna*, Volume 2, Nomer 2, Desember 2015, 269.

budaya pada hakekatnya terkait dengan sikap moral. Seseorang yang memiliki moral yang baik akan cenderung menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang keji, sebaliknya orang yang memiliki moral buruk, ia akan selalu mendekati perbuatan-perbuatan keji. Diantara faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi, yaitu:

Pertama, lemahnya iman. Orang-orang yang memiliki iman kuat, ia akan terhindar dari perbuatan korupsi, karena menghindar dan menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebaliknya, orang yang memiliki iman yang lemah, akan cenderung melakukan perbuatan keji seperti korupsi.

Kedua, lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum sangat mempengaruhi orang-orang dalam melakukan tindakan korupsi. Karena dengan lemahnya hukum ini, akan meringankan bahkan menghindari orang-orang dari sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelaku korupsi.

Ketiga, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Salah satu faktor maraknya tindakan korupsi adalah ketidaktahuan masyarakat akan definisi korupsi yang sebenarnya, bentuk-bentuk korupsi, macam-macam korupsi, serta ketentuan dan sanksi hukumnya. Sehingga dalam hal ini, masyarakat banyak menganggap remeh terhadap tindakan korupsi yang tanpa disadari sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, desakan kebutuhan ekonomi. Alasan yang banyak digunakan oleh para koruptor adalah masalah ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memudahkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya dengan cara korupsi.

4. Persepsi yang populer bahwa korupsi itu sudah dilakukan banyak orang, sementara pelakunya hanya mendapat sanksi ringan.

Maraknya tindakan korupsi, dan kurang perhatiannya masyarakat akan kasus ini menjadikan korupsi banyak dilakukan, apalagi tidak hanya aparat pemerintahan saja pelakunya, tapi sudah menjalar ke lini terbawah. Dilihat dari melemahnya penegak hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga sebagian masyarakat menganggap “remeh” dalam kasus ini.

5. Pengaturan yang bertele-tele, dan
6. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan korupsi, mulai dari macam-macam korupsi, dampak korupsi, ketentuan dan hukum korupsi. Maka sangat diperlukannya sosialisasi korupsi untuk masyarakat secara bertahap dan merata. Melalui berbagai media sosial elektronik maupun cetak menjadi sarana dalam mensosialisasikan pengetahuan tentang korupsi, dengan melibatkan berbagai pihak, mengingat korupsi bisa terjadi pada siapapun.

Ada juga yang membagi penyebab korupsi dari aspek motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pelaku korupsi. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri pelaku korupsi. Secara eksplisit, korupsi terjadi setidaknya disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, *corruption by greed* (keserakahan). Korupsi karena keserakahan. Hal ini terjadi pada orang yang sebenarnya sudah kaya, kebutuhan tercukupi, tapi karena sifat serakah yang dimiliki menyebabkan mereka terlibat korupsi. Faktor keserakahan inilah yang menjadi pandangan umum dalam

kurangnya pendidikan moral yang dimiliki oleh masyarakat, bahkan bukan kemajuan bangsa yang ada, tapi kemerosotan bangsa. Lemahnya moral yang ada tidak hanya dilakukan oleh para kaum bawah, tapi juga sampai pada tingkat elite. Kasus yang sering terjadi adalah kasus korupsi dimana dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, sebab kasus korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, mengakibatkan kerugian keuangan Negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahnya nilai moral dan etika.

Semakin kompleksnya problematika korupsi di Negara ini, pendidikan sangat diharapkan dan berperan penting untuk menanamkan sikap anti koruptif dengan membangun pendidikan karakter pada peserta didik sejak dini. Melalui pendidikan, pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa korupsi merupakan salahsatu sikap yang bertentangan dengan agama dan hukum.

Hal tersebut dapat dicermati setidaknya dikarenakan dua hal. Pertama, gejala reduksi moralitas sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, dengan indikasi empirik masih tingginya angka korupsi. Kedua, arus masuk generasi muda ke lembaga pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan sebagai bagian dari diskursus pengembangan SDM di Indonesia yang seutuhnya.

Sumber Daya Manusia dalam suatu Negara menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga sangat diperlukan dalam pengembangan SDM secara optimal. Tidak hanya pengembangan *hard skills* saja tapi juga pengembangan *soft skills*. Lebih lanjut lagi, jika pengembangan

menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia. Manusi mempunyai bakat dan kemampuan yang jika terus digunakan dan diasah ia akan menjadi intan yang sangat berharga, bisa menjadi kekayaan yang berlimpah-limpah.³²

Hal ini memberikan pemahaman kepada kita, bahwa pentingnya pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan akal manusia, tapi juga pendidikan melatih spiritual dan emosional manusia. Terlebih untuk memahami bagaimana ia harus bersikap sebagai warga masyarakat dan sebagai warga Negara.

Salah satu upaya sebagai bekal utama untuk mencegah terjadinya korupsi adalah pengembangan sikap, moral, dan kepribadian peserta didik sejak dini. Hal ini tidaklah mudah, karena proses ini memerlukan waktu yang tidak singkat, karena untuk membentuk watak dan karakter peserta didik melalui pengembangan sikap, moral dan kepribadian memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan dengan pembiasaan-pembiasaan yang sering dilakukan.³³ Pada usia ini, sangat penting dilakukan untuk menanamkan sifat dan sikap positif anak untuk membentuk watak dan karakter pada anak.

Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan korupsi merupakan basisi falsafah dalam pendidikan nilai dan moral agama. Secara filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan yang merusak (stabilitas nasional, etika, dan norma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah mapan (*established*) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama.

³² Nadri Taja dan Helmi Aziz, Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, 41.

³³ Lu'mu Taris dan Mantasiah R, Implementasi Media Pembelajaran Anti Korupsi Berbasis Gender untuk Menanamkan Nilai-nilai Kejujuran di SD, *Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI*, Vol. 19, No. 2, Desember 2016, 101.

Kata mendidik pada umumnya dipahami sebagai suatu cara dalam menyiapkan dan membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya, yaitu sebagai manusia yang utuh. Secara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, membantu manusia untuk menjadi manusia seutuhnya, berbudaya, dan bernilai tinggi.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi merupakan proses pembelajaran dengan pengenalan-pengenalan dan pemberian informasi terkait nilai-nilai anti korupsi (ontologis dan epistemologis) sehingga, menjadikan seseorang memahami dan mengetahui nilai-nilai anti korupsi yang dapat menjadikan dirinya manusia yang bermoral (aksiologis), memiliki karakter baik, bertanggung jawab dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pendidikan anti korupsi sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, tidak hanya untuk kalangan dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Menyiapkan generasi muda yang anti korupsi, berbudaya anti korupsi, berwatak anti korupsi, bertanggung jawab terhadap problematika korupsi, dan memiliki nilai sosial dalam membantu pencegahan korupsi. Karena disadari atau tidak, korupsi bisa saja dialami oleh generasi muda bangsa. Pada saat tertentu, para generasi muda bisa menjadi korban korupsi, menjadi pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan kejahatan korupsi, bahkan bisa saja menjadi pihak yang menentang korupsi.

Signifikansi pendidikan harus mampu menjadikan diri peserta didik sebagai salah satu instrument perubahan yang mampu melakukan *empowerment* (terhadap tindak kejahatan korupsi) dan transformasi masyarakat melalui berbagai program melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan

Pentingnya dalam hal pemberantasan korupsi, kita ketahui bersama, ada dua hal tindakan besar yang bisa dilakukan, yaitu 1) penindakan, 2) pencegahan. Dalam hal ini, tidak akan berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat dalam hal pencegahan perilaku korupsi.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu diperlukan upaya dalam hal pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi ini bisa dilakukan pada anak usia dini untuk membentuk karakter dan moral pada anak. Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya yang efektif dalam pencegahan korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi pada anak akan membantu membentuk generasi bangsa yang bertanggung jawab, dengan begitu dapat mengurangi kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Dalam perspektif pendidikan, jalur pendidikan merupakan jalur strategis dalam pembentukan karakter bangsa yang kuat. Dengan melalui jalur pendidikan ini, kita dapat membangun karakter bangsa (*character building*) kepada anak-anak bangsa mengenai tanggung jawab sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bertanggung jawab terhadap kekayaan Negara. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya sadar dan sistematis dalam membangun generasi muda yang bertanggung jawab dan nasionalis. Melalui jalur pendidikan baik formal, informal, maupun non formal diharapkan menjadi pencerahan dan penyadaran bagi peserta didik, karena sesungguhnya tanpa adanya

solusi apa yang sudah dikembangkan, dan apa yang perlu diperhatikan agar gerakan ini menjadi lebih baik.

Apabila berbicara mengenai bagaimana pergerakan ini, para agen sangat aktif dan berkembang luas dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti koruptif. Bahkan tidak pernah berani membayangkan saat meluncurkan pada 22 April 2015. Mereka melakukannya (selain di keluarga) di tempat-tempat yang tidak terbayangkan seperti di angkutan umum (bus way, angkot), di pusat kebugaran, di bandara, di selasar mall, di perkampungan, di kaki gunung, pos satpam yang bahkan tidak mungkin dilakukan oleh para penegak hukum manapun. Tentunya selain di rapat-rapat atau pertemuan kantor, di gereja, madrasah, masjid, sekolah, kampus, arisan, pengajian, pelatihan-pelatihan, kantor-kantor pemerintah dan swasta. Teman-teman agen ini melakukannya dimana saja dan kapan saja. Perangkat sosialisasi ada dalam tas mereka setiap hari. Sangat diapresiasi untuk para agensudah membantu melakukan pencegahan korupsi. Mereka melakukannya dengan sumber daya mereka sendiri. Setiap hari ada lebih dari 5 foto kegiatan yang mereka lakukan terpampang di *Facebook Group* yang sudah dibuat. Sehingga dari media sosial inilah akan terlihat bagaimana pergerakan ini semakin hari semakin menguat.

Sebagai gambaran, dari sesi post ToT terakhir yang sudah dilaksanakan di kota Palu dalam 3 bulan 30 agen telah mensosialisasi pengetahuan anti korupsi pada lebih dari 3,592 orang dan anak-anak. Dengan demikian dalam sebulan

Tabel 3.2 Penyebaran Agen SPAK di Indonesia

No	Kota agen SPAK	Penyebaran agen SPAK
1	Agen SPAK Provinsi DKI Jakarta	a. Kota administratif Jakarta Timur
		b. Kota administratif Jakarta Barat
		c. Kota administratif Jakarta Selatan
		d. Kota administratif Jakarta Pusat
		e. Kota administratif Jakarta Utara
2	Agen SPAK provinsi Jawa Barat	a. Kota Bandung
		b. Kota Depok
		c. Kabupaten Indramayu
		d. Kota Cimahi
		e. Kota Bogor
		f. Kota Bekasi
3	Agen SPAK provinsi NTT	a. kota Kupang
		b. Kabupaten Alor
		c. Kabupaten Belu
		d. Kabupaten Ende
		e. Kabupaten Flores Timur
		f. Kabupaten Kupang
		g. Kabupaten Lembata
		h. Kabupaten Malaka
		i. Kabupaten Manggarai
		j. Kabupaten Manggarai Barat
		k. Kabupaten Manggarai Timur
		l. Kabupaten Ngada
		m. Kabupaten Nagekeo
		n. Kabupaten Rote Ndao

No	Kota agen SPAK	Penyebaran agen SPAK
		o. Kabupaten Sabu Raijua
		p. Kabupaten Sikka
		q. Kabupaten Sumba Barat
		r. Kabupaten Sumba Barat Daya
		s. Kabupaten Sumba Tengah
		t. Kabupaten Sumba Timur
		u. Kabupaten Timor Tengah Selatan
		v. Kabupaten Timor Tengah Utara
4	Agen SPAK provinsi NTB	a. kota Mataram
		b. Kabupaten Bima
		c. Kabupaten Lombok Barat
		d. Kabupaten Lombok Tengah
		e. Kabupaten Lombok Timur
		f. Kabupaten Lombok Utara
		g. Kabupaten Sumbawa
		h. Kabupaten Sumbawa Barat
		i. Kota Bima
5	Agen SPAK Provinsi Sulawesi Selatan	a. Kota Makassar
		b. Kabupaten Barru
		c. Kabupaten Bone
		d. Kabupaten Enrekang
		e. Kabupaten Gowa
		f. Kabupaten Maros
		g. Kabupaten Pinrang
		h. Kabupaten Takalar
		i. Kabupaten Sidrap

No	Kota agen SPAK	Penyebaran agen SPAK
		j. Kota Pare-pare
6	Agen SPAK Provinsi Jawa Tengah	a. Kota Surakarta
7	Agen SPAK Jogjakarta	a. Kota Jogjakarta
		b. Kabupaten Bantul
		c. Kabupaten Gunung Kidul
		d. Kabupaten Kulon Progo
		e. Kabupaten Sleman
8	Agen SPAK Provinsi Sulawesi Utara	a. Kota Manado
9	Agen SPAK Provinsi Sulawesi Tengah	a. Kota Palu
		b. Kota Poso
10	Agen SPAK Provinsi Sulawesi Tenggara	a. Kota Kendari
		b. Kabupaten Konawe
11	Agen SPAK Provinsi Gorontalo	a. Kota Gorontalo
12	Agen SPAK Provinsi Jawa Timur	a. Kota Surabaya
		b. Kabupaten Bangkalan
		c. Kabupaten Bojonegoro
		d. Kabupaten Jember
		e. Kabupaten Jombang
		f. Kabupaten Kediri
		g. Kota Malang
		h. Kota Mojokerto
		i. Kabupaten Pasuruan
		j. Kabupaten Sampang

ratusan sivitas akademika menyatakan bahwa mulai saat itu tidak akan menerima hadiah apapun dari mahasiswa;

4. Agen SPAK di Sulawesi menyatakan tidak lagi bersedia melakukan mark-up nilai pekerjaan-pekerjaan yang datang ke lembaganya. Adanya juga agen SPAK yang berhasil menyelamatkan dana lembaganya dari ancaman korupsi.
5. Masih di Sulawesi, petugas yang mengurus kartu keluarga, BPJS atau SKTM tidak lagi meminta uang rokok atau uang transportasi juga menolak pemberian. Dia mengatakan 'sekarang saya merasa lebih ikhlas membantu terutama untuk orang-orang yang memang membutuhkan'. Agen SPAK Sulawesi saat ini sudah menjadi mitra baik pemerintah kota maupun provinsi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di daerahnya;
6. Agen SPAK Jogjakarta yang kebetulan istri lurah, berhasil mendorong suaminya untuk mencabut kebijakan pemungutan biaya administrasi di luar yang seharusnya;
7. Masih di Sulawesi, anak umur 9 tahun (karena bermain *game* Semai, *game* khusus untuk anak-anak, tentang 9 nilai moral), berhasil melarang ibunya memberi hadiah pada guru saat kenaikan kelas. Anak mengatakan: 'karena aku peduli dengan teman-temanku yang tidak punya uang untuk kasih kado guru';
8. Agen SPAK Sulawesi dan NTT serta meminta semua tim kerjanya untuk melakukan hal yang sama, tidak mau lagi menandatangani surat perjalanan dinas (SPPD) yang sebenarnya tidak pernah terjadi;

Program-program meningkatkan integritas individu juga merupakan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dan ditujukan oleh individu dan masyarakat luas. Perlunya program pencegahan korupsi dengan rancangan sosial dan budaya yang mendorong mental masyarakat yang bebas korupsi. Sehingga sangat dibutuhkan suatu gerakan anti korupsi yang mengakar, berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang yang mengusung nilai anti korupsi, bukan hanya yang bersifat jargon atau kampanye terbatas.

Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi harus didukung secara paralel dan perbaikan-perbaikan integritas oleh pemerintah dan masyarakat. Karena dalam prakteknya, penanaman nilai anti korupsi tidaklah mudah. Diperlukan usaha yang optimal dan berkelanjutan agar tujuan dari pendidikan anti korupsi bisa dikatakan berhasil. Dari semua program pemerintah dalam upaya preventif korupsi perlu dilakukan analisis ketercapaian program agar mengetahui hal-hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan program.

Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” merupakan gerakan kaum perempuan sebagai agen perubahan dimasa yang akan datang. Mundiroh lailatul Munawaroh sebagai ketua koordinasi SPAK di Kabupaten Bangkalan menjelaskan bahwa SPAK ini dikhususkan untuk perempuan, karena perempuan merupakan figure sentral dalam menanamkan pendidikan, memiliki karakter khas sebagai ibu untuk melahirkan, mengembangkan dan memelihara serta lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat luas. Kata “saya” dalam “Saya, Perempuan Anti Korupsi” artinya bahwa dalam

2. Usaha Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Gerakan SPAK memiliki program-program yang bisa dilaksanakan dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Secara umum program ini terdiri dari dua kegiatan, pertama pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen SPAK. Kedua, sosialisasi pengetahuan anti korupsi. Pelatihan untuk fasilitator atau agen SPAK bisa disebut sebagai ToT (*Training of Trainer*). ToT ini berlangsung selama 3 hari. Hari pertama adalah penjelasan tentang delik-delik korupsi, seperti definisi korupsi, macam dan jenis korupsi, usaha pencegahan korupsi dan lain sebagainya. Hari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat bantu sosialisasi. Alat bantu atau media dalam sosialisasi anti korupsi berupa permainan edukasi yang memiliki spesifikasi tingkatan, ada empat jenis permainan yang ditawarkan, yaitu Semai, Majo, Arisan, dan Put Put LK. Dan hari ketiga, yaitu simulasi melakukan sosialisasi. Pada hari ketiga, peserta akan diminta untuk membuat rencana sosialisasi yang akan dilakukan dalam tiga bulan kedepan. Perencanaan ini dibuat seringan mungkin, karena sebagai rencana awal, bisa dari keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat umum.

Sejarah gerakan SPAK di Kabupaten Bangkalan, berawal dari seorang aktivis pemuda Bangkalan yaitu Mahasiswi Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga “Mundiroh Lailatul Munawaroh” yang melihat kegiatan SPAK kota lain di media sosial *facebook* pada tahun 2016. Sehingga

Dalam sejarahnya di Indonesia, korupsi sudah mengakar pada semua lapisan masyarakat. Fenomena ini sudah terjadi lama terjadinya, dan menjadi menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Praktek korupsi ada sejak Indonesia sebelum merdeka. Seperti adanya pemberian upeti oleh segolongan masyarakat kepada seorang penguasa untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Dengan begitu, praktek korupsi sudah ada sejak era sebelum kemerdekaan, bahkan praktek korupsi di Indonesia ini berlanjut pada era pasca kemerdekaan, baik pada masa orde lama maupun pada masa orde baru.³ Setelah masa orde baru, berakhir, tindakan korupsi makin terlihat jelas dan masih berkembang hingga saat ini. Tidak heran jika korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia karena, pemberitaan media massa yang menyuguhkan kasus-kasus korupsi setiap hari yang tidak pernah habis diberitakan, baik yang dilakukan oleh kalangan elit maupun oleh masyarakat biasa.

Pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya menyerang kalangan elite saja, tapi sudah mengakar pada lapisan masyarakat. Perlunya upaya dalam memberantas tindakan korupsi ini hingga ke akarnya. Berbagai cara yang telah dilakukan baik itu dilakukan oleh lembaga korupsi sendiri maupun dukungan dari masyarakat. Akan tetapi, banyak dari sebagian masyarakat yang menganggap remeh hal ini. Pandangan masyarakat akan korupsi hanya terbatas pada penggelapan uang saja, sehingga beranggapan keterlibatannya tidak akan berpengaruh dalam membantu pemberantasan korupsi. Minimnya pengetahuan serta kurangnya rasa peduli

³Feni Qoriroh dan Maya Mustika Kartika Sari, Partisipasi Aktivistis Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dalam Upaya Pendidikan Anti Korupsi di Surabaya, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 03. Nomor 04 Tahun 2016, 1279.

masyarakat terhadap bangsa menjadi salah satu faktor Indonesia terus berada pada peringkat tinggi sebagai Negara terkorup di dunia.

Salah satu kasus korupsi yang menyeret nama Bupati Bangkalan yaitu Fuad Amin Imron pada periode 2003-2013, dengan dikenakan hukuman 13 tahun penjara, ketua DPRD Bangkalan 2004-2019 itu terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang kurun waktu 2003-2014 mencapai RP 414 miliar.⁴ Pelaku tindak pidana korupsi tidak melihat status sosial seseorang, banyaknya pelaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, hingga akhirnya pada akhir tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan ancaman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi dengan di berhentikan secara tidak terhormat. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵ Penerapan kebijakan ini mencerminkan pemerintah dapat berlaku adil untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar hukum dan merugikan Negara.

Upaya pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dengan adanya lembaga yang bertugas khusus dalam penanganan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan KPK. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman pada lima asas, yaitu

⁴ Detik News, “Korupsi RP 414 Miliar, Berapa Gaji Fuad Amin Eks Bupati Bangkalan?”, dalam <https://news.detik.com/berita/3657623/korupsi-rp-414-miliar-berapa-gaji-fuad-amin-eks-bupati-bangkalan> (20 Januari 2019).

⁵ Ahmad Faisol, Akhir Tahun ini, ASN Bangkalan yang Terlibat Kasus Korupsi Terancam dipecat, *Tribun Madura.co*, <http://jatim.tribunnews.com/2018/10/16/akhir-tahun-ini-asn-bangkalan-yang-terlibat-kasus-korupsi-terancam-dipecat>, 6 April 2019.

kepentingan yang relatif dalam membantu pencegahan dan penyadaran tentang korupsi melalui program-program yang dimilikinya.

Kedua, perbedaan kekuatan dari masing-masing peran. Dengan melihat fungsi dari gerakan SPAK adalah sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Disini gerakan SPAK memiliki karakter sendiri dalam membantu program pemerintah. Melalui agen-agen gerakan SPAK yang tersebar luas di 34 Provinsi di Indonesia, artinya gerakan ini dirancang untuk menumbuhkan perubahan dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan terdekat, lingkungan sosial yang lebih luas dan seterusnya. Bedanya gerakan SPAK dengan komunitas anti korupsi lainnya adalah gerakan ini bukan sekedar gerakan biasa, melainkan melalui pelatihan atau ToT yang dilakukan oleh SPAK pusat dan dengan cara bersosialisasi menggunakan media permainan yang mengedukasi dan menyenangkan. Dengan para agen dari kalangan perempuan yang memiliki kekuatan dalam melakukan perubahan untuk bangsa.

Ketiga, isolasi aktivitas peran. Gerakan ini dikembangkan untuk mengurangi perilaku korupsi di Indonesia. Dengan adanya gerakan SPAK, masyarakat khususnya kaum perempuan dapat membantu program pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi yang sudah berkembang luas di Negara kita. Keberadaannya tidak hanya untuk upaya pencegahan perilaku koruptif, tetapi juga adanya pengembangan pemuda khususnya gerakan SPAK Bangkalan yang berinisiatif untuk bekerjasama melakukan suatu proses aksi sosial pencegahan anti korupsi.

Keempat. Adanya konflik. Gerakan SPAK lahir dikarenakan adanya survey yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2012-2013 yang menyatakan bahwa orang tua yang mengajarkan nilai kejujuran pada anak hanya 4 persen saja. Tidak hanya itu, masalah-masalah yang dianggap kecil tapi nyatanya itu adalah benih perilaku korupsi yang biasa terjadi di masyarakat seperti menerobos antrian, menyontek di dalam kelas, memberikan uang rokok atau uang lelah kepada petugas pelayanan publik, memberikan hadiah pada guru saat kenaikan kelas atau pada hari ulang tahun guru, karena tanpa disadari hadiah itu menjebak guru pada munculnya dorongan untuk memberikan perhatian lebih pada salah satu siswa dan menjadi bertindak kurang adil pada siswa yang tidak memberi hadiah, dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya gerakan SPAK, contoh-contoh masalah di atas bisa teratasi dengan memberikan pemahaman pemahaman tentang delik korupsi. Dari data AACH (*Anti Corruption Clearing House*), beberapa agen SPAK yang telah berhasil melaksanakan program SPAK di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya:

- a. Agen SPAK NTB. Berhasil membebaskan 400 pasangan miskin dari pungli untuk mendapatkan akta kawin, serta adanya ikrar dari siswa SMP untuk tidak menyontek.
- b. Agen SPAK Bandung, saat ini sudah menjadi mitra Dinas Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah Kota Bandung dalam merumuskan rencana pembangunan institusi pendidikan dan kesehatan berintegritas. Dalam kegiatan SPAK Bandung di sebuah Perguruan Tinggi, seorang dosen

strategis dalam mencegah korupsi sekaligus memiliki dampak besar bagi keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia.¹¹Dukungan yang diterima gerakan SPAK berdampak positif dalam penyebaran nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi dari berbagai kalangan.

Keenam, membatasi peran. Gerakan SPAK ini dilahirkan atas pemahaman bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan bersamaan antara pencegahan dan penindakan. Akan tetapi, penindakan hanya bisa dilakukan oleh aparat pemerintah penegak hukum. Dengan jumlah penegak hukum yang terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Indonesia. Sedangkan pencegahan bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, keterlibatan peran masyarakat dapat membantu dalam pencegahan korupsi yang menjadi peluang terbesar dalam mengurangi perilaku korupsi di Indonesia.

Dari beberapa skenario yang dijalankan oleh gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" dapat dijadikan pemaparan bahwa peran yang diambil oleh gerakan SPAK di Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai wadah untuk membantu program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi melalui pelatihan fasilitator atau calon agen untuk memahami cara bersosialisasi nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat, kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk melakukan pencegahan perilaku koruptif, serta pengembangan pemuda dalam melakukan proses aksi sosial melawan korupsi.

¹¹ Melati Tagore, Dianggap Strategis Cegah Korupsi, Menag Dukung SPAK, *Moeslim Choice*, dalam <http://www.moeslimchoice.com/read/2019/03/04/19274/dianggap-strategis-cegah-korupsi-menag-dukung-spak>, 02 Mei 2019.

B. UsahaGerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” dalam Pendidikan Anti Korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Gerakan SPAK memiliki program-program yang bisa dilaksanakan dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Secara umum program ini terdiri dari dua kegiatan, pertama pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen SPAK. Kedua, sosialisasi pengetahuan anti korupsi. Pelatihan untuk fasilitator atau agen SPAK bisa disebut sebagai ToT (*Training of Trainer*). ToT ini berlangsung selama 3 hari. Hari pertama adalah penjelasan tentang delik-delik korupsi, seperti definisi korupsi, macam dan jenis korupsi, usaha pencegahan korupsi dan lain sebagainya. Hari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat bantu sosialisasi. Alat bantu atau media dalam sosialisasi anti korupsi berupa permainan edukasi yang memiliki spesifikasi tingkatan, ada empat jenis permainan yang ditawarkan, yaitu Semai, Majo, Arisan, dan Put Put LK. Dan hari ketiga, yaitu simulasi melakukan sosialisasi. Pada hari ketiga, peserta akan diminta untuk membuat rencana sosialisasi yang akan dilakukan dalam tiga bulan kedepan. Perencanaan ini dibuat seringan mungkin, karena sebagai rencana awal, bisa dari keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat umum.

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di berbagai instansi yang ada di Bangkalan, seperti di sekolah, kampus, dan yang lainnya. Dengan menggunakan alat atau media dalam mensosialisasikan pendidikan anti korupsi, ada empat permainan yang digunakan sebagai alat atau media sosialisasi yaitu: *pertama*, SEMAI (Semi Permainan) mengajarkan anak-anak sembilan nilai anti korupsi yaitu, kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerjasama, kedisiplinan,

keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian. Dari permainan ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter dan pribadi anti korupsi sejak dini. Permainan ini menggambarkan cerita kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Sehingga memudahkan anak memahami maksud dari permainan ini. Semai terdiri dari 3 unsur, yaitu papan permainan yang berisi 9 nilai anti korupsi, kartu putih yang berisi cerita kehidupan sehari-hari, dan kartu merah berisi pertanyaan edukasi. Semai dimainkan oleh dua orang atau dengan berkelompok dengan dipandu seorang fasilitator.

Kedua, MAJO (lima jodoh) adalah permainan dengan mengenal berbagai tindakan korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Majo terdiri dari papan permainan, kartu putih yang berisi sebuah situasi dan kartu merah berisi pertanyaan. Majo bisa dimainkan oleh empat orang atau kelompok dengan dipandu oleh seorang fasilitator. Pada papan permainan di setiap sisinya terdapat lima kotak berwarna hijau, oranye, biru dan ungu. Dari lima kotak tersebut bertuliskan perilaku koruptif/Tindak pidana korupsi, Gratifikasi, suap, tindak pidana pencucian uang, sikap anti korupsi dan peran serta masyarakat.

Ketiga, Arisan adalah sebuah permainan dengan sistem arisan menggunakan toples berisi gulungan pertanyaan, ada 79 undian pertanyaan. 25 kartu hijau, 30 kartu biru, dan 30 kartu merah. Permainan ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu, baik secara individual maupun dengan berkelompok.

Keempat, Put Put LK adalah permainan seperti jam dinding dengan memutar jarum untuk menunjuk kartu yang berisi pertanyaan. Permainan ini

harus dibangun terlebih dahulu.¹³ Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu jalur strategis dalam pembinaan karakter bangsa yang kuat.

Urgensi pendidikan anti korupsi terutama bagi siswa untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi, karena dalam realitasnya, korupsi tidak hanya bisa diberantas oleh penegakan hukum, melainkan membutuhkan penanganan yang optimal melalui pendidikan anti korupsi. Pada dasarnya, pendidikan anti korupsi bukanlah suatu sistem yang baru dalam dunia pendidikan, pendidikan anti korupsi sejalan dengan pendidikan karakter yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, pendidikan anti korupsi diharapkan tidak hanya bersifat kognitif dan teoritis saja, melainkan juga lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik dengan memberikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai anti korupsi bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan akal semata, melainkan melatih kemampuan spiritual dan emosional anak melalui aspek-aspek yang telah diajarkan, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Membentuk pribadi yang anti korupsi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan usaha yang maksimal dengan membangunnya secara terus menerus sejak usia dini.

Melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini diharapkan dapat menjembatani usaha meminimalisasi praktek tindak pidana korupsi yang sudah

¹³ Ikka Nur Wahyuni, Pengembangan Pendidikan *Financial Literacy* Berbasis Nilai-nilai Anti Korupsi sebagai Investasi Sosial: Sebuah pemikiran, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 07 November 2015. 2.

¹⁴ Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam, *Kariman*, Volume 01, No. 01, Tahun 2015, 4.

mengakar kuat di Indonesia. Karena pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas kemanusiaan melalui perbaikan akal dan budi serta pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa.

Keberadaan gerakan SPAK sebagai wadah dalam meminimalisasi perbuatan koruptif melalui pendidikan anti korupsi menjadi salah satu cara pemerintah dengan mengajak peran masyarakat terutama kaum perempuan untuk terlibat sebagai penggerak perubahan bangsa terutama untuk kasus korupsi. Melalui gerakan SPAK dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk korupsi sehingga dapat melakukan pembangunan karakter bangsa (*character building*) kepada anak-anak bangsa mengenai tanggung jawab sosial kepada bangsa, Negara dan kekayaan Negara.

Pelaksanaan program-program gerakan SPAK harus memperhatikan aspek-aspek yang menjadi faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Dalam hal ini, sangat penting dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan gerakan SPAK. Secara umum, faktor pendukung dan faktor penghambat terbagi menjadi dua unsur, faktor internal dan faktor eksternal.

Ada beberapa aspek yang menjadi faktor pendukung dari internal gerakan SPAK Bangkalan, Nurul Farida sebagai agen SPAK Bangkalan mengemukakan bahwa besar keinginan para agen untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi dengan bergabung di gerakan SPAK, sehingga banyaknya jumlah agen SPAK Bangkalan yang tersebar di beberapa kecamatan, ada 13 agen yang terdiri dari kalangan

mahasiswi, dosen, guru, pelajar, dan ibu rumah tangga. Dalam mensosialisasikan pendidikan anti korupsi, para agen juga menggunakan media berupa permainan edukasi yang menyenangkan, dengan beberapa karakter permainan sesuai dengan tingkatan peserta. Sehingga memudahkan para fasilitator untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang delik korupsi, serta peserta mampu memahami maksud dan tujuan dari permainan SPAK ini.

Sedangkan faktor pendukung eksternal SPAK Bangkalan, diantaranya adalah gerakan SPAK Bangkalan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sehingga memudahkan SPAK untuk melaksanakan programnya di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan. SPAK juga memiliki relasi dengan instansi/lembaga lain, sehingga memudahkan dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi.

Tidak hanya itu, pada akhir pekan, gerakan SPAK Bangkalan juga membuka stand di pusat kota, seperti di alun-alun Bangkalan maupun di Stadion Bangkalan. Para agen akan mengajak para pengunjung seperti anak-anak, orang tua, mahasiswa, pelajar, untuk ikut bergabung bermain permainan SPAK. Dengan cara ini, gerakan SPAK dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat Bangkalan untuk lebih mengenal tentang bahaya korupsi yang dapat merusak tatanan bangsa.

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, gerakan SPAK sebagai salah satu program pemerintah, juga memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan program-programnya. Dengan menganalisis apa saja yang menjadi

faktor penghambat program SPAK yang kemudian di evaluasi untuk meminimalisasi kekurang-kekurangan program SPAK.

Di Kabupaten Bangkalan, program SPAK juga memiliki faktor-faktor internal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya seperti kesibukan para agen yang menjadi faktor penghambat utama dalam menjalani program SPAK. Karena dengan kesibukan para agen ini, akan berpengaruh terhadap keaktifan dalam menjalani program SPAK. Sehingga dengan kesibukan para agen, menjadikan gerakan SPAK ini belum terlaksana secara optimal dan belum melekat pada masyarakat Bangkalan.

Disamping karena kesibukan para agen SPAK, yang menjadi faktor penghambat yang lain adalah kurangnya media yang digunakan oleh agen. Di SPAK Bangkalan sendiri terhitung hanya ada beberapa alat dari setiap jenis permainan. Dan tidak semua agen memegang alat permainan ini. Ini menjadi penghambat ketika ada agen yang ingin melakukan sosialisasi tetapi harus mengambil alat permainan di agen yang lain.

Dalam proses melakukan sosialisasi, ada beberapa kendala yang diterima oleh para agen. Seperti yang diterima oleh salah satu agen bahwa ada beberapa anggapan masyarakat Bangkalan yang meremehkan SPAK. Seperti ucapan "*mana mungkin ini bisa menghapus korupsi, korupsi kan sudah mendarah daging di Indonesia*". Atau ketika para agen mengenalkan media permainan, "*halah, Cuma game*", ucapan yang seperti sudah banyak didengar oleh para agen ketika sedang melakukan sosialisasi. Tidak hanya itu, terkadang ada masyarakat yang menghindar secara halus bahkan menolak.

Walaupun ada beberapa anggapan masyarakat yang meremehkan program SPAK, tidak menyurutkan niat para agen untuk membantu memberikan wawasan dan pemahaman anti korupsi kepada masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas menjadi motivasi SPAK Bangkalan untuk terus bergerak aktif memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat di Indonesia dengan upaya pencegahan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi.

Dalam menganalisa faktor-faktor penghambat program “Saya Perempuan Anti Korupsi” di Kabupaten Bangkalan perlu adanya evaluasi agar mengetahui dan mencari pemecahan masalah dalam setiap program yang dilaksanakan. Beberapa faktor penghambat program SPAK di Kabupaten Bangkalan baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh terhadap keefektifan dari program SPAK dalam masyarakat. Solusi dari permasalahan program SPAK adalah 1) para agen lebih banyak memiliki waktu bersosialisasi program kegiatan SPAK agar lebih dikenal oleh masyarakat, 2) para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT yang diadakan oleh SPAK pusat agar menjadi agen resmi dalam mensosialisasikan pendidikan anti korupsi, 3) para agen lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan program SPAK agar tidak ada lagi anggapan negatif dari masyarakat terhadap SPAK sehingga akan terlihat keberhasilan program SPAK di Kabupaten Bangkalan.

memudahkan SPAK dalam melaksanakan programnya dengan surat pengantar dari Dinas Pendidikan, SPAK Bangkalan juga memiliki relasi dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bangkalan. sedangkan Faktor penghambat dari program SPAK Bangkalan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kesibukan para agen SPAK sehingga jarang untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Serta kurangnya media permainan yang digunakan dalam melakukan sosialisasi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari sebagian masyarakat yang menganggap remeh program SPAK. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan program SPAK adalah 1) seharusnya para agen lebih banyak memiliki waktu bersosialisasi program kegiatan SPAK agar lebih dikenal oleh masyarakat, 2) para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT yang diadakan oleh SPAK pusat agar menjadi agen resmi dalam mensosialisasikan pendidikan anti korupsi, 3) para agen lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan program SPAK agar tidak ada lagi anggapan negatif dari masyarakat terhadap SPAK sehingga akan terlihat keberhasilan program SPAK di Kabupaten Bangkalan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, terutama lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) agar lebih dikembangkan dan diperluas kembali untuk pelatihan atau ToT bagi calon agen SPAK di berbagai daerah sehingga lebih banyak melahirkan calon agen

resmi SPAK dengan meningkatkan kemampuan calon agen dalam menyebarkan pengetahuan anti korupsi

2. Bagi agen SPAK Bangkalan dalam mensukseskan program SPAK agar gerakannya lebih aktif, dapat meluangkan sedikit waktu dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat Bangkalan, dan diharapkan agen yang lain juga dapat mengikuti pelatihan atau ToT yang diadakan oleh KPK dan AIPJ, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi.
3. Bagi calon peneliti berikutnya, peneliti sadar bahwa penelitian ini tidak sempurna, peneliti hanya memaparkan data sesuai dengan di lapangan. Gerakan SPAK ini bisa diteliti dari berbagai aspek dan bidang keilmuan.

- Hamuni dan Karsadi. Pengembangan Model Ketahanan Nasional melalui Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Kewarganegaraan di Kalangan Siswa SMA se-Kabupaten Konawe. *SELAMI IPS Edisi Nomor 40*, Volume 2 Tahun XIX Agustus 2014.
- Hardianti, Putri. “Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisa’ Ayat 58” (*Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2017*).
- Harto, Kasinyo. “Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama”. *Jurnal Intizar*. Vol. 20, No. 1. 2014.
- John W. Creswell, John W. “*Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches*”, California: SAGE Publications, 2009.
- Junus Aditjondro, George. *Jurnal Wacana: Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia*. 2003. Yogyakarta: Insist Press.
- K Merton, Robert. “The Role-Set: Problems in Sociological Theory”. *The British Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 2.) Jun., 1957.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> (29 Januari 2019).
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2012. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. 2013. Jakarta: GP Press Group.
- Muslim, Abi al-Husain, ibn al-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. 2014. Kairo: Syirkah al-Qudus.
- Mustaki, Muh. Wawasan Al-Qur’an tentang Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid*. Vol. 2, No. 1, Januari 2013.
- Merton, Robert dalam Piotr Sztompka. *The Blackwell Companion to Major Sosial Theorists*. 2000. Malden: Mass. Blackwell.
- Merton, Robert K. *On Theoretical Sociology*. 1967. New York: The Free Press.
- Nasir, Ridlwan, dkk. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. 2006. Surabaya: IAIN Press & LKiS.

- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosiologi*. 2001. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Qoriroh, Feni dan Sari, Kartika, Mustika, Maya. Partisipasi Aktivis Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dalam Upaya Pendidikan Anti Korupsi di Surabaya, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 03. Nomor 04 Tahun 2016.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. 2012. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. 2007. Surabaya: Unesa University Press.
- Sajistani (Al), Abu Daud. *Sunan Abi Dāūd*. Vol.2 . 2013. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah.
- Salistina, Dewi. Pendidikan Anti Korupsi melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral. *Ta'allum*. Vol. 03, No. 02, November 2015.
- Sarwono, Sarlino, Wirawan. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. 2015. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto, "Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologi", 2004. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- SPAK Indonesia, dalam <http://www.spakindonesia.org/index.php/about/> (5 Januari 2019).
- Stephen K. Sanderson, Stephen K. *Macro Sociology*. 2000. Jakarta: Grafindo.
- Taja, Nadri dan Aziz, Helmi. Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.
- Taris, Lu'mu dan Mantasiah R. Implementasi Media Pembelajaran Anti Korupsi Berbasis Gender untuk Menanamkan Nilai-nilai Kejujuran di SD. *Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI*. Vol. 19, No. 2, Desember 2016.
- Tribun Timur.com. "Transparency Internasional: Somalia Negara Paling Korup di Dunia, Denmark Paling Bersih, Indonesia?", (<http://makassar.tribunnews.com>, diakses pada 29 Januari 2019).
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1.

- Wahyuni, Nur, Ika. Pengembangan Pendidikan Financial Literacy Berbasis Nilai-nilai Anti Korupsi sebagai Investasi Sosial: Sebuah Pemikiran. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta*. 07 November 2015.
- Warsi Nugraheni, Molas. Pendidikan Antikorupsi dalam Model Pembelajaran Bahas Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011, *Transformatika*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2016.
- Wibowo, Agus. Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. 2013. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yaqin, Nurul. Program Anti Korupsi di Madrasah. *Islamuna*. Volume 2, Nomer 2, Desember 2015.

